

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil judul “Implementasi Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dalam Pengelolaan Kemandirian Pangan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. Dari beberapa kajian penelitian literature terdahulu beberapa penelitian yang membahas mengenai peran dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam Pengelolaan Kemandirian Pangan diuraikan dalam penelitian yaitu :

2.1.1 Penelitian yang dilakukan R Dudy Heryandi dkk tahun 2023 yang berjudul “Efektivitas Membangun Kemandirian Pangan Dari Rumah”. Pada penelitian ini penelitian ini berisikan tujuan untuk menunjukkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memberikan persediaan *supply* makanan dari rumah pada saat kondisi Covid-19 dimasa social distancing. Kemandirian pangan dilaksanakan berupa memberikan penyediaan makanan yang mulai dari rumah masing-masing dengan melakukan budidaya tanaman dan ikan dengan menggunakan media tanaman sebagai metode budidaya tanaman. Sehingga hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kemandirian pangan dengan upaya memanfaatkan lahan rumah yang kosong atau pekarangan rumah untuk dimanfaatkan melaksanakan budidaya tanaman dan peternakan ikan. Sehingga apabila di lihat dengan memanfaatkan potensi di daerah sendiri kemandirian pangan ini juga dilakukan dengan mengelolah produk tetangga untuk dimanfaatkan menjadi sebuah produk seperti susu kambing yang dikemas menjadi makanan atau minuman (R.Dudy Heryadi, 2022).

2.1.2 Penelitian yang di lakukan oleh Roby Saputra pada 2021 dengan mengambil judul “Analisis Kemandirian Pangan Berbasis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kota Metro, Provinsi Lampung”. Dari tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kapabilitas di Kota Metro dalam mencukupi produksi pangan secara mandiri berdasarkan perubahan perubahan dalam penggunaan lahan. Permasalahan pokok yang dihadapi yakni masih lemahnya kapasitas

kelembagaan dari kelompok tani pedesaan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat minimnya bantuan dari pemerintah setempat, selain itu masih terdapat permasalahan permodalan. Dengan adanya kondisi tersebut akhirnya pemerintah ingin menjalankan sebuah program lumbung pangan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan para petani. Program lumbung pangan ini merupakan sebuah usaha penyediaan lumbung pangan yang dihasilkan dari pertanian di Desa Telang Sari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwasanya program lumbung pangan di Kabupaten Banyuwangi ini telah dijalankan pada tahun 2020 dan masih terus berkembang sampai saat ini. Dari adanya kegiatan program ini harapan pemerintah dapat menjadi solusi atas permasalahan krisis pangan atau sebagai cadangan logistik nasional (Saputra et al., 2022).

2.1.3 Penelitian yang sudah dilakukan Gigih Ibnu Prayoga dkk, pada tahun 2022 dengan mengambil judul “Peningkatan Kemandirian Pangan Masyarakat Melalui Inisiasi Hidroponik dan Pemasaran Produk Berbasis E-commerce”. Kemandirian pangan akan tercapai apabila masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Salah satunya dengan kegiatan pertanian yang mendukung kemandirian pangan pada masyarakat yaitu berupa program kawasan rumah pangan lestari (KRPL). Salah satu program ini yang sangat identik adalah hidroponik yang dijadikan sebagai alternatif sistem budidaya pertanian yang cocok untuk lahan pekarangan dikarenakan dapat diaplikasikan pada lahan dan waktu yang terbatas. Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pemasaran produk pertanian. Karena menurut mereka hasil dari pertanian hidroponik ini selalu berlebihan sehingga sulit untuk dipasarkan. Oleh karena itu perlunya sebuah pelatihan terkait promosi dan pemasaran produk hasil pertanian berbasis *e-commerce* agar dapat meningkatkan daya saing dan jaul produk pertanian masyarakat (Ibnu Prayoga et al., 2023).

2.1.4 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mardalis dan Imron Rosyadi tahun 2022 di Surakarta dengan mengambil judul “Strategi Membangun Kemandirian Pangan Nasional Dengan Meminimalisir Impor

Untuk Kesejahteraan Rakyat”. Permasalahan yang dihadapi dimana pengelolaan lahan pertanian yang kurang maksimal serta pembibitan yang kurang unggul sehingga menjadikan permasalahan pada hasil pertanian, harga produksi pertanian serta pupuk yang mahal sehingga hasil cost dan profit bagi para petani menjadi tidak sejahtera. Dengan adanya permasalahan tersebut menjadikan sistem pemasaran hasil produksi pertanian tersebut menjadi sedikit lebih mahal. Oleh karena itu peneliti berharap atas peran pemerinrah sebagai fasilitator dan sebagai pengelola kebijakan untuk lebih memperhatikan bidang pangan pertanian yang sebagai prioritas dalam pembangunan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam tujuan untuk menjaga stabilitas harga produksi pertanian selain itu kehadiran negara perlu untuk dilibatkan agar hasil pangan pertanian dapat dikendalikan pada harga dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh (Hakim & Irawan, 2021).

2.1.5 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muchijidin Rachmat pada tahun 2023 di Bogor dengan mengambil judul “ Percepatan Pembangunan Pangan Menuju Pencapaian Ketahanan Pangan yang Mandiri dan Berdaulat”. Dalam riset kali ini peneliti menyampaikan keberhasilan pembangunan pangan dapat dilihat dari peningkatan produksi dan penyediaan komoditas pangan dan tidak diikuti dengan adanya kerawanan pangan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk terus terus mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat yang dikaitkan dengan perkembangan dinamika lingkungan. Sehingga perlu adanya sebuah pembangunan pangan dalam bentuk peningkatan produksi pangan yang lebih meluas dan beragam. Dari hasil penelitian salah satu yang menjadi strategi percepatan dalam ketahanan pangan yang mandiri yaitu dengan peningkatan produksi pangan yang beragam, pengembangan budaya pangan lokal, pengelolaan perdagangan pangan dan melakukan penguatan cadangan pangan masyarakat (Triman Tapi et al., 2021).

2.1.6 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syahyuti, Sunarsih dan Sri Wahyuni yang berjudul “Kedaulatan Pangan Sebagai Basis Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan” pada tahun 2019 di Bogor. Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa kedaulatan pangan adalah suatu langkah

strategi untuk mencukupi kebutuhan pembangunan pangan yaitu ketahanan pangan. Konsep kedaulatan pangan ini menjadi tujaun dalam menciptakan pangan nasional yang sudah diatru dalam UU No. 18 Tahun 2012 mengenai pangan yang memiliki kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Namun saat ini masih banyaknya pandangan yang sangat beragam mengenai kedaulatan pangan yang sangat global ini. Dari hasil risetnya bahwasanya kedaulatan pangan berkaitan dengan hak dan akses petani kepada elemen sumber daya pertanian yang mencakup lahan, air, sarana produksi, teknologi serta konsumsi yang mana dapat diukur dari standart individu, rumah tangga, komunitas, wilayah dan juga level nasional (P. Simatupang, 2022).

2.1.7 Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Valeriana Darwis dengan judul “Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Ketahanan Pangan dan Kemiskinan”. Program kemandirian pangan merupakan suatu perwujudan ketahanan pangan dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu dampak lainnya juga terjadinya peningkatan frekuensi makan, konsusmi pangan hewani, perbaikan ekonomi, sandang, pangan dan akses pelayanan kesehatan. Desa mandiri pangan telah berkontribusi positif pada penurunan rawan pangan dan kemiskinan, namun indeks kemiskinan di Jawa masih tinggi sekitar 36,43% dan di Luar Jawa sekitar 43,69% selain itu kemandirian pangan ini masih belum bisa memperbaiki Rumah Tangga Miskin. Oleh karenanya perlu adanya sebuah komitmen yang kuat dan menerapkan Desa Mandiri Pangan untuk mencapai dimensi pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (Azahari, 2020).

2.1.8 Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Valeriana Darwis “Gerakan Kemandirian Pangan Melalui Program Desa Mandiri Pangan: Analisis Kinerja dan Kendala”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program mandiri pangan ini sudah dijalankan sejak tahun 2006 yang tersebar dalam 158 desa yang sudah dilaksanakan pembinaan secara lebih efektif yakni di 3 desa. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa kelompok tidak dapat menjalankan secara maksimal karena tidak adanya kemajuan dalam mencapai masalah dan pelaksanaan program, serta tidak dapat berjalan secara maksimal sehingga menyebabkan kelemahan pada program desa mandirian pangan

tidak aktif seperti golongan kelompok, Lembaga Keuangan Desa dan Tim Pangan Desa.

2.1.9 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kliwon Hidayat dan Jefri Putri Nugraha dengan mengambil judul “Program Aksi Desa Mandiri Pangan: (proses pelaksanaan dan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin di desa Tamanasri, Kabupaten Pacitan”. Dalam penelitian menjelaskan pada awalnya masyarakat disiplin dalam melakukan pinjam di Bank, koperasi dan tempat yang lainnya dan menabung dan melakukan peminjaman pada kelompok atau LKP pada setiap bulannya. Salah satu kemajuan masyarakat adalah dengan menjual 50 % hasil panen ke pasar dan sisanya mereka gunakan sebagai cadangan stok pangan keluarga dan konsumsi pribadi mereka. Pada saat itu masyarakat mengkonsumsi makanan yang lebih bergizi maka mereka tidak akan mengalami kekurangan bahan makanan. Sehingga kebutuhan pangan mereka akan terpenuhi dan meningkat menjadi 11,65% dari pendapatan rumah tangga pada setiap tahun mencapai 11,27% sedangkan pengeluaran rumah tangga untuk pangan turun menjadi 56% dari 73 % sehingga kondisi kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan memiliki pemahaman pada pengetahuan dan keterampilan menjadi lebih produktif (Marhaeti et al., 2022).

2.1.0 Berdasarkan penelitian Rinas Ekawati dkk dengan mengambil judul “Optimalisasi Lahan Pekarangan dengan Budidaya Tanaman Sayuran sebagai Salah Satu Alternatif dalam Mencapai Strategi Kemandirian Pangan” di Yogyakarta. Dalam penelitiannya dijelaskan Lahan pekarangan dapat menjadi salah satu alternatif sebagai lahan budidaya untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, terutama tanaman sayuran. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Dusun Danen, Kelurahan Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang: (1) Pemilihan jenis media tanam yang tepat; (2) Kandungan nutrisi dalam sayuran; (3) Tahapan budidaya sayuran dalam polybag; (4) Manajemen kelompok tani; dan (5) Penghematan anggaran belanja rumah tangga dengan adanya budidaya sayuran di pekarangan rumah sendiri. Jika pemenuhan

kebutuhan sayur rumah tangga dari pekarangan rumah 25%, maka potensi penghematan belanja rumah tangga sekitar Rp 3.000,00 per hari (Ekawati et al., 2021).

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Teori Implementasi

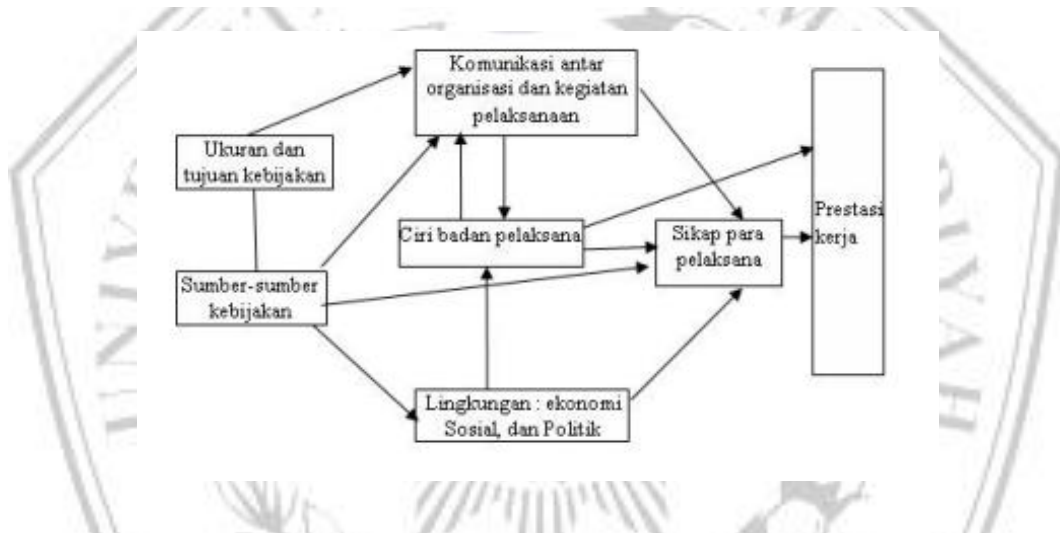
Penjelasan mengenai implementasi dihubungkan dengan apabila dikaitkan dengan sebuah peraturan atau kebijakan yang dikenalkan kepada seluruh masyarakat. Implementasi merupakan serangkaian tindakan yang penting dalam proses perencanaan peraturan atau kebijakan. Selain itu beberapa penjelasan mengenai implementasi menurut Jones dalam penelitian (Kurniawan et al., 2022); *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* yang berarti sebuah proses menjalankan program atau kegiatan sampai terciptanya sebuah hasil. Namun berbeda apabila menggunakan penjelasan berdasarkan dari teori Van Meter dan Van Horn : *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (berupa perilaku yang diambil pemerintah). Sehingga pengertian mengenai implementasi merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang dapat diambil apabila pada suatu kebijakan tersebut telah ditetapkan selain itu Implementasi merupakan sebuah metode agar kebijakan ini dapat dijalankan mencapai tujuan yang diharapkan.

Namun dalam sudut pandangan yang lain menurut Webster Dictionary (Ruhana et al., 2020). menjelaskan mengenai penjelasan implementasi adalah: “Implementasi berasal dari kata *“implementation”* berasal dari bahasa *“to implement”* sedangkan kata *to implement* ini berasal dari bahasa latin *“implementatum”* dari asal kata *“impre”* yang ditambahkan *“to fill up”*, *“to fill in”* yang memiliki arti mengisi penuh, melengkapi sedangkan *“plere”* maksudnya *“to fill”* yaitu mengisi selanjutnya kata *“to implement”* ini digolongkan sebagai berikut : (1) *to implement* berarti membawa ke suatu hasil, melengkapi dan menyesuaikan. (2) maksud *to implement* adalah menyediakan sarana (alat) untuk melakukan sesuatu dan menghasilkan

sebuah hasil yang bersifat praktis yang bermanfaat. (3) *to implement* yang dimaksud ini adalah menyediakan atau melengkapi dengan sebuah alat.

Menurut Van Meter dan Horn, Implementasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan tertentu (Fauziyah & Arif, 2021). Dalam hal ini peneliti menjelaskan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan implementasi adalah ketika kebijakan diterapkan secara bertahap, berawal dari keputusan politik dan beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan berdasarkan dari teori Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

Bagan 2 Analisis Teori Van Meter dan Van Horn



Sumber 4 Solichin Abdul Wahab, Implementasi Kebijakan Negara, 1991:66.

### 1. Standar Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Proses untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan. Sehingga dapat terlihat apakah pelaksanaan tersebut sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ukuran dari capaian keberhasilan yang ditetapkan berdasarkan kondisi sosial dan budaya yang akan ditetapkan. Apabila tujuan tersebut terlalu tinggi atau idealis maka praktik implementasi cukup sulit untuk dicapai.

### 2. Sumber Daya

Sumber daya menurut Van Mater dan Van Horn adalah kebijakan yang tersedia dalam membuat administrasi implementasi kebijakan agar lebih

mudah. Sumber daya kebijakan ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap komunikasi, di dalam sumber daya terdapat dana atau insentif yang bisa digunakan untuk memfasilitasi berlangsungnya pelaksanaan implementasi kebijakan. Dimana yang menjadi faktor utama yang menyebabkan implementasi tidak terlaksanakan dengan baik apabila kurangnya atau tidak sesuai uang insentif yang disediakan (Ananda et al., 2022).

### **3. Karakteristik Agen Pelaksana**

Pelaksanaan atau implementor perlu memiliki kualitas seperti integritas dan jiwa loyalitas yang cukup tinggi. Loyalitas yang tinggi dari pelaksanaan implementasi atau implementor ini akan membuat mereka memiliki motivasi untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Sikap yang jujur dapat mengakomodir implementor untuk berada dalam harapan program yang sudah digariskan. Seperti yang dinyatakan oleh Edward III sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi peraturan kebijakan sudah sesuai dan dilakukan dengan benar berdasarkan tujuan dan ketentuan yang ada.

### **4. Komunikasi antar organisasi mengenai pelaksanaan kegiatan**

Menurut pandangan studi dari Van Mater dan Van Horn seseorang yang dapat mengimplementasikan setidaknya harus memahami standar tujuan. Apabila dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau mereka yang menjalankan program atau pekerjaan informasi yang disampaikan oleh implementor harus disatukan sebagai sumber informasi yang konsistensi. Selain itu informasi yang disampaikan harus akurat dan berasal dari sumber yang sudah terpercaya.

### **5. Disposisi atau Sikap Pelaksanan**

Van Mater dan Van Horn mengatakan bahwa pelaksana implementasi kebijakan dimulai dengan tahapan seleksi untuk mengetahui posisi mana kebijakan tersebut untuk dilaksanakan. Ada tiga jenis perilaku yang dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka salah satunya yang pertama : a) Kebijaksanaan, pemahaman dan pengertian mengenai kebijakan, b) Bagaimanan merespon apakah sudah netral atau

tidak, c) Seberapa kuat mereka dalam menghadapi dan menangani situasi (Ananda et al., 2022).

## **6. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi**

Varibael yang termasuk dalam sumber daya lingkungan ekonomin didukung dengan adanya keberhasilan implementasi kebijakan, yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak kelompok kepentingan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan berdasarkan dari sudut pandangan dari sudut pandangan lingkungan publik. Maka jika dilihat elit politik tersebut ada yang mendukung atau bahkan menolak implementasi kebijakan. Maka pelaksanaan implementasi kebijakan pada dasarnya mencakup sebuah tindakan atau perilaku dari individu atau kelompok yang berada di pemerintahan atau swasta.

Model pendekatan yang diimplementasikan oleh Van Meter dan Van Han merupakan sebuah contoh atau implementasi dari perwujudan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakna yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengibaratkan keputusan politik, pelaksanaan dan kinerja kebijakan publik berkolerasi dengan implementasi kebijakan. Dimana model implementasi ini masuk dalam model top-down yang memandang bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara mekanis yang difokuskan kepada pengendalian yang efektif.

### **2.2.2 Kemandirian Pangan**

Kemandirian atau *self reliance* merupakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas secara signifikan. Konsep kemandirian pangan ini adalah hak bagi setiap negara memutuskan nasibnya sendiri dengan menentukan apa yang terbaik untuk setiap individu masing-masing. Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa untuk menghasilkan beraneka ragam pangan dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan yang berkecukupan. Dalam penjelasan (Sasana & Muid, 2020) mengemukakan dalam artikelnya yang berbunyi “Everyone has the right to a standart of living adequate for the health and well-being of himself and of this family,

including food” dapat diartikan sebagai berikut “Setiap orang memiliki hak atas kehidupan standar yang cukup untuk kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya termasuk makanan”. Dalam hal ini makanan yang dimaksud berupa pangan yang sebagai kebutuhan yang paling utama untuk manusia, karena untuk memenuhi kebutuhan pangan merupakan hak bagi setiap individu.

Strategi dan kebijakan pangan yang difokuskan untuk mencukupi ketahanan pangan yang berkelanjutan dan dikaitkan dengan peningkatan kemandirian pangan nasional (Puspitaningrum et al., 2021). Penjelasan mengenai ketahanan pangan menjelaskan bahwa apabila ketersediaan pangan yang memadai menjadi sangat penting namun tidak cukup untuk memadai dan menjamin ketahanan pangan. Selain itu dalam penelitian FOA (2002) bahwa setiap negara memiliki dengan jumlah penduduk berada di atas 100 juta orang dengan kebutuhan pangannya yang bergantung pada impor yang membuat negara menjadi maju, sejahtera dan berdaulat menjadi sedikit sulit. Kemandirian pangan ini diperlukan untuk menopang keberlanjutan kehidupan manusia yang tujuannya berupa kegiatan bertani yang dihadapkan dengan tantangan saat ini seperti untuk mengajak bagi generasi muda dalam menarik perhatian kepada bidang pertanian, ketersediaan infrastruktur, pengembangan teknologi informasi serta meningkatkan pada sistem pemasaran khususnya dalam bidang pertanian.

### **2.2.3 Peningkatan Perekonomian**

Peningkatan perekonomian merupakan sebuah metode untuk menghasilkan usaha atau kemampuan yang baik. Sedangkan perekonomian yang berasal dari kata *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Kata perekonomian ini diambilkan dari imbuhan per- dan -an yang memahami cara mengelola rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi peningkatan perekonomian merupakan tindakan atau cara mengelola yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penjelasan lain menurut (Manduapessy & Ola, 2022) dalam buku (Lincoln Arsyad) Peningkatan artinya Peningkatan atau perbaikan. Namun penjelasan mengenai perekonomian merupakan bidang

yang menyelidiki dasar-dasar pembutan, penggunaan dan distribusi barang dan kekayaan seperti contohnya bisnis, keuangan dan perdagangan. Selain itu konsep ini juga diartikan sebagai peningkatan perekonomian sebagai perbaikan kondisi perekonomian dari yang rendah menjadi lebih baik untuk kemajuan dari yang sebelumnya.

Teori mengenai peningkatan ekonomi dapat dalam penelitian (F. Simatupang & Marselina, 2023) yang diklasifikasikan dalam berbagai macam kelompok berupa teori klasik, teori neoklasik, teori neokeynes. Berikut penjelasan mengenai teori klasik yaitu teori ini berkembang dari pada abad ke-17 dari dua tokoh sebagai berikut :

**a. Adam Smith**

Di dalam buku *An Inquiry into Nature and Cause Wealkth of Nation* (1776), Adam Smith menjelaskan pendapatnya mengenai peningkatan ekonomi yang dipengaruhi oleh dua faktor. Kedua faktor tersebut yakni faktor output total yang dilakukan dengan tiga variable seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan persediaan capital dan modal. Selain itu pada faktor kedua yakni pertumbuhan yang digunakan untuk menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi.

**b. David Ricardo**

Dalam pemikirannya pertumbuhan perekonomian yang disebut dengan *the law diminishing retrun* pada pandangan tentang bagaimana penurunan produksi yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan kemampuan kerja. Pendapatnya mengatakan bahwa peningkatan pelaksanaan kerja yang memerlukan pada bidang teknologi berkembang dan akumulasi yang cukup.

Selanjutnya mengani teori Neoklasik yaitu pertumbuhan ekonomi yang dicetuskan oleh tokoh Joseph A Schumpeter yang berjudul *The Theory of Economic Development* yang membicarakan mengenai bagaimana pengusaha berperan dalam pembangunan. Sedangkan pada tokoh pertumbuhan ekonomi kedua yakni Robert Solow yang berpendapat petumbuhan ekonomi bergantung pada empat hal yaitu : manusia, modal teknologi dan hasil.

Penjelasan terakhir mengenai peningkatan ekonomi dari teori Neokeynes dalam sudut pandang tokoh Roy F.Hard dan Evsey D Domar, Menjelaskan dari pandangan tokoh tersebut menjelaskan mengenai adanya dampak investasi terhadap pertumbuhan kapaistas dan permintaa target yang sesuai. Sehingga padangan mengenai teori ini bahwasannya berhasilnya pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi dari penanaman modal.

